

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur di setiap daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya pembangunan bisa menunjang perekonomian dan dapat memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Sebagai contoh, untuk daerah yang mengoptimalkan pembangunan wisata maka diperlukan sarana-sarana penunjang seperti tempat penginapan, hotel dan jalan yang baik untuk kenyamanan wisatawan datang berkunjung ke daerah tersebut. Dengan adanya pembangunan di sektor industri juga bisa lebih mengoptimalkan pengolahan bahan mentah yang ada dalam suatu daerah demi dan untuk masyarakat daerah tersebut. Sebab sektor-sektor industri, bisa memanfaatkan bahan-bahan mentah tersebut supaya kegunaannya menjadi lebih besar.

Setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan industri dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang nantinya bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Pengolahan limbah industri yang buruk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Akibatnya, warga yang tinggal di lingkungan sekitar akan ikut tercemar dan terserang berbagai macam penyakit. Tak hanya masyarakat, hewan dan tumbuhan pun akan ikut terpapar dampak buruk polusi dari industri. Namun dengan pengaturan dan pengolahan limbah yang tepat akan mengurangi dampak

negatif ini.¹ Untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut maka lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola dengan baik. Menurut Muchammad Taufiq tujuan pengelolaan lingkungan dilakukan untuk mencegah dampak negatif, menanggulangi dan mengendalikan dampak negatif yang timbul dan meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut memberikan manfaat yang besar.²

Kota Yogyakarta sebagai kota yang terus mengalami perkembangan, baik dilihat dari segi aktivitas maupun jumlah penduduknya, mengharuskan adanya pembangunan yang menunjang kebutuhan masyarakat dan daerah. Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi juga secara tidak langsung memberi dampak bagi pertambahan sarana dan prasarana akibat perkembangan kebutuhan penduduk kota. Perkembangan nenicu maraknya pembangunan di Yogyakarta khususnya pembangunan di sektor pariwisata seperti hotel dan penginapan bagi wisatawan yang berkunjung. Hal ini memberi implikasi bagi semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Apalagi setelah adanya kebijakan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) di Kota Yogyakarta yang berdampak bagi semakin meluasnya kawasan permukiman, komersial, dan berkembangnya jalur transportasi. Dengan adanya kebijakan ini akan memacu maraknya bangunan-bangunan tinggi seperti hotel bertingkat dan pusat perbelanjaan untuk tujuan aglomerasi perkotaan.

¹ Redaksi, "14 Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan yang Wajib Diketahui", <https://materiips.com/dampak-pembangunan-terhadap-lingkungan>, Diakses pada 10 Juli 2019, pukul 13.31 WIB.

² Muchammad Taufiq, 2011, "Kedudukan dan Prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal WIGA No, 2088-0944*. Lumajang.

Menurut pandangan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), bangunan tinggi ini membuat risiko bencana semakin tinggi. Forum PRB menyebutkan ada tiga bencana yang muncul akibat pembangunan, yakni bencana banjir, krisis air, dan konflik sosial. Di Yogyakarta, beberapa ancaman bencana itu sudah terbukti. Bangunan tinggi, yang didominasi hotel dan apartemen, membuat sumur warga kering akibat perebutan sumber air. Kasus ini terjadi pada Fave Hotel di Miliran dan hotel 101 di Gowongan—keduanya di Kota Yogyakarta. Dalam kasus Fave Hotel, puluhan sumur warga mengering akibat perebutan air tanah antara warga dan hotel. Sedangkan di hotel 101 ada lebih dari 35 kepala keluarga kesulitan air akibat sumur mengering. Eko Teguh Paripurno, peneliti Penanggulangan Bencana dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, melakukan riset terkait dampak pembangunan hotel di Yogyakarta terhadap krisis air. Hasilnya, sejak 2006, permukaan air tanah terus menurun 15-50 sentimeter per tahun. Akibatnya, warga Yogyakarta semakin susah menjangkau air tanah.³

Pemerintah melalui peraturan daerah dan penegakan Hukum Administrasi perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus hadir untuk meminimalisir dan mengurangi dampak buruk dari setiap pembangunan kepada lingkungan dan masyarakat. Hukum merupakan perangkat untuk mengatur dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan diterapkannya

³ Mawa Kresna, 2017, “Resiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Yogyakarta”, <https://tirto.id/risiko-dan-nasib-buruk-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-bkWg>. Diakses pada 10 Juni 2019 pukul 20.10 WIB.

hukum diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelanggar agar supaya tercipta lingkungan yang baik bagi kepentingan bersama. Berdasarkan hal ini peneliti ingin meneliti tentang Penegakan Hukum Administrasi dalam Hal Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi-sanksi Administrasi dalam hal kewajiban pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritis dan praksis tentang Penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan di Kota Yogyakarta

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas tentang bagaimana penegakan hukum administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan di Kota Yogyakarta

b. Mamaparkan dengan jelas kepada masyarakat dan pengusaha sanksi-sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta.